

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN PASAR EKSTREM DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

Sanshita Fizlina Fasol

NPP : 31.0845

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Administrasi Pemerintah Daaerah
Email: 31.0845@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Suboptimal market management in Tomohon Extreme Market occurs due to several factors such as inadequate facilities, traders' discipline in market retribution, lack of supervision by market management officers, and legislation that has not been updated. Handling these conditions requires the involvement of relevant government agencies and the community, especially traders in the Tomohon City market. **Purpose:** The aim of the research is to find out and analyze government coordination in the management of Extreme Market in Tomohon City, North Sulawesi Province so as to be able to provide the right solution to the problems that exist in the Extreme Market. **Method:** Using qualitative methods with a descriptive approach. The number of research samples was 13 informants taken using purposive sampling technique where informants were selected based on their knowledge of the information to be obtained. Data collection using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and data verification. **Results:** The majority of informants said that government coordination carried out by the Department of Trade and Industry of Tomohon City with related institutions in the management of extreme markets that occur in Tomohon City, North Sulawesi Province is quite good based on the aspects of coordination reviewed, namely Communication, Awareness of the importance of coordination; Competence of Participants, Government Calendar; Agreements and Commitments, Determination of agreements by coordinating parties, Coordination Incentives; and Feedback. **Conclusion:** Government coordination in the management of Extreme Market in Tomohon City, North Sulawesi Province has been running well.

Keywords: Coordination, Extreme Market, Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan pasar yang belum optimal di Pasar Ekstrem Tomohon terjadi karena beberapa faktor seperti fasilitas kurang memadai, kedisiplinan pedagang dalam retribusi pasar, kurang pengawasan petugas pengelola pasar, dan aturan perundang-undangan yang belum terbaru. Penanganan kondisi tersebut sangat memerlukan melibatkan instansi pemerintah terkait serta masyarakat khususnya pedagang di pasar Kota Tomohon. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sehingga mampu memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada di Pasar Ekstrem. **Metode:** Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jumlah sampel penelitian sebanyak 13 informan yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih berdasarkan pengetahuannya terhadap informasi yang ingin diperoleh. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil:** Mayoritas informan

mengatakan bahwa koordinasi pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon dengan Lembaga-Lembaga terkait dalam pengelolaan Pasar Ekstrem yang terjadi di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik berdasarkan aspek koordinasi yang ditinjau yaitu Komunikasi, Kesadaran pentingnya koordinasi; Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan; Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi, Insentif Koordinasi; dan Feedback. **Kesimpulan:** Koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Koordinasi, Pasar Ekstrem, Pengelolaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar tradisional adalah aset yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia yang kedudukannya sangat penting sebab pasar ini menjadi dorongan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Perdagangan yang dilaksanakan di pasar tradisional ini menjadi indikator yang dibutuhkan untuk mempertahankan stabilitas pangan serta keperluan pokok lainnya. Pasar tradisional mempunyai kedudukan khusus dalam dua lingkup pemerintahan sebab kedudukan pasar ini menjadi pusat bagi ekonomi masyarakat. Pedagang kecil sangat bergantung dengan pasar tradisional sehingga pemerintah yang menjadi regulator harus memberikan perlindungan dan melakukan pemberdayaan (Arianty, 2013). Kedudukan serta fungsi pasar tradisional hanya bisa berkembang jika terdapat kepedulian dari pihak pemerintah sehingga kebijakan berkaitan dengan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional bisa dilaksanakan. Kebijakan untuk mengelola pasar dijadikan sebagai bentuk tindakan yang nyata sehingga setiap pihak harus bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini dapat dicontohkan dengan salah satu pasar yang ada di Minahasa Sulawesi Utara serta bahkan dikenal sebagai pasar nasional dan internasional menjadi satu kearifan lokal yang selanjutnya dikenal sebagai pasar ekstrem Tomohon. Pasar ini dikenal dengan pasar ekstrim sebab pasar ini menyediakan berbagai macam daging yang tidak mudah ditemukan di lingkungan masyarakat dan tidak semua masyarakat mengkonsumsinya contohnya anjing, tikus yang berwarna putih, kelelawar, kera, serta ular patola (Hasrin, 2022).

Dibalik perannya yang besar dalam kehidupan masyarakat, keberadaan pasar Ekstrem tidak terlewat dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan pasar tersebut, yaitu kurangnya perhatian terhadap fasilitas pasar, ketidaktertiban pedagang mengenai pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan penataan pasar, sehingga keberadaan pasar tradisional perlu dikelola agar mampu bersaing dengan pusat perdagangan lain. Pembentukan Pasar Ekstrem yang ada di Tomohon dilaksanakan pada tahun 2003. Legalitas pasar eksterem dilaksanakan dengan membentuk lembaga organisasi perusahaan daerah pasar atau dikenal dengan PD Pasar yang dituntut bisa mengoptimalkan tanggung jawabnya. Walaupun pelaksanaannya memiliki harapan untuk menciptakan rasa nyaman dan aman, tetapi tidak seluruhnya menggambarkan kejayaan yang berkesinambungan. Kondisi ini menjadi masalah yang berhubungan dengan regulasi wajib (Medyawati & Rahayu, 2021)

Jumlah pedagang Pasar Ekstrem di Kota Tomohon ±1100 pedagang, terdiri atas pedagang tetap yang berjumlah ±850 dan pedagang tidak tetap yang berjumlah ±250 pedagang. Banyaknya pedagang yang berjualan di pasar tersebut harus diimbangi dengan fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan Daerah pasar atau dinas terkait, dan petugas pasar mampu menertibkan pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar Ekstrem Tomohon. Upaya untuk pengelolaan pasar dalam penyediaan fasilitas dan penertiban pedagang dilakukan dengan penyediaan sumber daya manusia yang cukup. Berdasarkan laporan APBD tahun 2023 oleh PD Pasar Eskترم Tomohon menunjukkan bahwa dari segi jumlah pegawai yang mengelola

Pasar Ekstrem dapat dikategorikan cukup, akan tetapi pengelolaan Pasar tersebut masih dibawah standar, disamping itu pasar ini sudah terkenal baik nasional maupun internasional. Banyak orang dari luar Sulawesi bahkan luar negeri yang mengunjungi pasar tersebut bukan hanya sekedar membeli tetapi melihat keanekaragaman hewan yang dijual di pasar tersebut. Maka dari itu pengelolaan pasar seharusnya lebih ditingkatkan lagi (Mesra, 2022)

Terkait koordinasi yang akan dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pemerintah yang dimaksud dengan koordinasi pemerintah yaitu pengaturan kegiatan hubungan industrial antara pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah dengan instansi pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban yang saling berhubungan, dimana pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan yang tumpang tindih. Namun, kenyataannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, permasalahan koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya (Rompas, 2013). Berdasarkan identifikasi terkait pengelolaan Pasar Ekstrem Kota Tomohon harus dijalankan koordinasi yang sejalan dalam penanganan hal tersebut. Sehingga pada penelitian ini akan melihat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tomohon dalam menangani pengelolaan Pasar Ekstrem Kota Tomohon. Hal-hal inilah yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan fokus **“Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara”**

1.2 Kesenjangan masalah yang di ambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, terdapat berbagai macam permasalahan yang menyebabkan pengelolaan Pasar Ekstrem Tomohon harus ditingkatkan lagi, dengan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti di internet, media dan komunikasi terdapat beberapa masalah adalah pengelolaan pasar yang belum optimal, kurangnya pengawasan dan ketegasan dari petugas bagian pengelolaan PD pasar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon dalam hal pemungutan retribusi pasar Ekstrem terhadap kios-kios dan los di Pasar Ekstrem Tomohon, fasilitas pasar serta fasilitas penunjang yang diberikan oleh pengelola pasar kepada para pedagang masih kurang memadai, pedagang yang tidak disiplin dalam membayar retribusi pasar, Tidak tercapainya pengelolaan pasar yang maksimal dikarenakan aturan perundang-undang belum terbaru yang menyebabkan aturan tidak efektif digunakan di masa sekarang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka koordinasi diperlukan untuk merealisasikan pengelolaan Pasar Ekstrem Kota Tomohon dan diproses dengan melibatkan instansi pemerintah terkait serta masyarakat khususnya pedagang di pasar Kota Tomohon. Koordinasi ini perlu dilakukan karena bertujuan untuk menyelaraskan dan menyatukan seluruh kegiatan yang sedang berjalan. Apabila kegiatan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik maka seluruh kegiatan para pihak terkait dapat selaras dengan tujuan bersama. Kesenjangan teori dengan masalah yang ada di lapangan menjadi

1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam bentuk koordinasi dan pengelolaan suatu organisasi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Azizah, (2019) dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil” menunjukkan hasil bahwa manajemen pengelolaan Pasar Tradisional tergolong kurang baik jika dilihat dari aspek penyediaan infrastruktur, perbaikan sarana dan prasarana Pengelolaan yang kurang baik menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut bersama pemerintah setempat. Penelitian Mustikasari, (2018) dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional (Junjung Buih) di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang” menunjukkan bahwa terdapat kesulitan dalam menggerakkan pedagang di Pasar Tradisional “Junjung Buih”. Langkah yang dapat dilakuka

untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, membentuk organisasi pasar agar mudah dalam melakukan koordinasi dengan pedagang serta melakukan perawatan terhadap saran dan prasarana pasar Junjung buih. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2018) dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Johar Oleh dinas Pasar Kota Semarang” menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Pasar Johar yang telah dilakukan belum optimal dalam memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dibutuhkan strategi baru. Strategi yang disarankan adalah meningkatkan fungsi dan peran stakeholder dalam mengembangkan potensi terutama daya saing Pasar Johar, mengembangkan kerjasama dengan pemerintah/swasta untuk meningkatkan pelayanan sarana prasarana, peningkatan koordinasi antara Dinas, Pemerintah, UPTD, dan pedagang untuk melakukan perbaikan bangunan atau sarana prasarana sesuai aturan yang ada, mengembangkan kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk mengatasi kekurangan anggaran, dan melakukan kerjasama dengan pedagang dalam penataan untuk mengatasi kurangnya daya tampung. Penelitian Ihsan, (2018) dengan judul “Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Aset Daerah” menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi antara pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi. Selain Koordinasi juga kurangnya berjalannya manajemen asset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan pembangunan pada Pasar Cik Puan dihentikan sejak tahun 2009. Penelitian Hermanto, (2017) dengan judul “Pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang” menunjukkan hasil bahwa koordinasi dan implementasi kebijakan memberikan kontribusi terhadap efektivitas kerja pegawai. Selanjutnya hasil analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa koordinasi dan implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai baik secara parsial maupun simultan. Penelitian Octavia, (2020) dengan judul Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil bahwa koordinasi pengorganisasian terkait pembagian kerja sudah berjalan dengan baik, namun pada tingkat pengawasan belum optimal dilakukan oleh Dinas Perindustrian perdagangan. Penelitian (Darmawan, 2017) dengan judul “Faktor Komunikasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional” menunjukkan bahwa semakin cermat transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional yang berdaya saing. Penelitian oleh Tampil et al., (2021) dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional Towo’e Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe Pada Pandemi Covid-19” menunjukkan bahwa pengelolaan yang dijalankan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Sangihe dalam pengelolaan pasar tradisional berdasarkan hasil penelitian belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan penerapan pengelolaan pasar yang dilakukan tidak disertai dengan ketegasan dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Penelitian Irawan, (2019) yang melakukan penelitian yang berjudul “Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pedagang dalam Pengelolaan Pasar Tertib Ukur (PTU) (Studi pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro)” menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah yang ada di kota Metro dengan pedagang dalam pengelolaan peserta aktif ukur sudah dinilai dengan sangat baik ditinjau berdasarkan empat indikator yakni membagi tugas serta tanggung jawab di organisasi, kondisi persaudaraan serta semangat melakukan kerja sama yang besar pada sebuah organisasi, berbagai macam kontrak maupun komunikasi yang cukup optimal serta koordinasi ditentukan maupun diimplementasikan sebagai bentuk kesatuan dengan merencanakan membimbingnya mengendalikan sudah terlaksana dengan optimal. Penelitian Arman, (2019) dengan Judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Balang-Balang Kabupaten Gowa” menunjukkan bahwa koordinasi yaitu dapat dilihat jika sistem pengendalian dapat membantu mendukung perkembangan pasar. Selanjutnya beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap strategi pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional yaitu perilaku

masyarakat yang digambarkan dengan karakteristik pedagang serta pembeli yang kurang bisa tertib, situasi sarana maupun prasarana belum diperbaiki, selanjutnya tidak terdapat regulasi yang jelas untuk bisa menjaga ketertiban supaya terjadi kesinambungan situasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbaruan pada penelitian ini dapat dilihat dari perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teori yang diterapkan, oleh karena itu teori yang digunakan juga berbeda, lokasi penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan juga berbeda. Penggunaan teori Konsep Koordinasi yang penulis gunakan ialah konsep yang dikemukakan oleh George R. yang mencakup 7 Sub Tema terdiri dari Komunikasi, Kesadaran pentingnya koordinasi; Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi, Insentif Koordinasi, dan Feedback. Selain itu, penulis akan meneliti faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon serta upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sehingga mampu memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada di Pasar Ekstrem

II. METODE

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih berdasarkan pengetahuannya terhadap informasi yang ingin diperoleh. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 13 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data *reduction*, *display*, dan *conclusion*. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Tomohon dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan pasar. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Tomohon dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan pasar. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Lokasi lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan penelitian mulai dari Agustus 2023 sampai juni 2024.

Tabel 2.1 Informan penelitian

Informan	Jumlah
Walikota Kota Tomohon	1 orang
DPRD Provinsi Kota Tomohon	1 orang
Asisten Sekretaris Daerah II bidang Perekonomian Kota Tomohon	1 orang
Kepala Bappeda Kota Tomohon	1 orang
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon	1 orang
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon	1 orang
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon	1 orang
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon	1 orang
Petugas PD Pasar Ekstrem Kota Tomohon	1 orang

Kepala Satpol PP Kota Tomohon	1 orang
Camat Tomohon Timur	1 orang
Lurah Paslaten Satu	1 orang
Pedagang atau pembeli Pasar Ekstrem di Kota Tomohon	3 orang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pada bagian ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah penelitian yaitu tentang koordinasi pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon dengan Lembaga-Lembaga terkait dalam pengelolaan Pasar Ekstrem yang terjadi di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

Konsep Koordinasi yang penulis gunakan ialah konsep yang dikemukakan oleh George R. Terry yang mencakup 7 Sub Tema terdiri dari Komunikasi, Kesadaran pentingnya koordinasi; Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi, Insentif Koordinasi, dan Feedback. Penulis akan membahas dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon serta upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

3.1.1 Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Pasar Ekstrem Di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon adalah sebuah OPD yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada kepala daerah dalam menjalankan kebijakan daerah serta tanggung jawab di bidang perindustrian serta perdagangan, melaksanakan masalah pemerintahan di bidang industri serta perdagangan, melaksanakan administrasi dinas, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan dinas, serta menyelenggarakan fungsi lain sejalan dengan tupoksinya.

1. Komunikasi

Ada Tidaknya Komunikasi

Komunikasi yang dilaksanakan oleh setiap pihak untuk membangun pasar ekstrem bersama-sama. Komunikasi yang dilaksanakan oleh setiap pihak itu dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan komunikasi yang disampaikan ketika rapat koordinasi sedangkan dalam bentuk tulisan komunikasi yang disampaikan menggunakan surat. Komunikasi yang tepat sangat dibutuhkan setiap hari. Komunikasi dilaksanakan di berbagai bidang mulai dari lingkungan hingga keluarga. Elemen yang dibutuhkan pada komunikasi mencakup keterampilan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan informasi yang disampaikan, memperhatikan kondisi, dan menggunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan sasaran.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Tingkat Pengetahuan Pelaksana Terhadap Pentingnya Berkoordinasi

Pelaksanaan koordinasi selalu dilaksanakan untuk kelancaran pengelolaan pasar ekstrem kota tomohon, dengan terlaksananya agenda koordinasi baik di level pemerintahan atas maupun bawah menunjukkan bahwa pihak terkait paham tentang pentingnya koordinasi. Setiap instansi mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik berkaitan dengan koordinasi. Koordinasi dinilai menjadi kegiatan yang sangat penting. Adanya koordinasi diharapkan pasar ekstrem di Kota Tomohon tidak hanya menjadi pasar yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi menjadi pasar yang mempunyai daya tarik wisata sehingga pasar ekstrem ini menjadi sarana perdagangan yang tepat guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan Koordinasi Built-in Dalam Setiap Job Desk

Pelaksanaan koordinasi dapat tercapai dengan baik tidak lepas dari pihak – pihak bersangkutan yang memahami dengan baik *job desk* masing – masing sehingga tugas dan kewajiban

terlaksana. Koordinasi sudah terlaksana dengan maksimal. Setiap pihak mampu berkoordinasi dengan baik ketika mengelola pasar ekstrem. Setiap instansi mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk mengelola pasar ekstrem di Kota Tomohon. Hal ini akan membentuk pelaksanaan tanggung jawab yang maksimal sebab setiap pihak mempunyai tupoksinya masing-masing.

3. Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan

Ada tidaknya Pejabat Kompeten

Pejabat yang kompeten dalam melaksanakan koordinasi dapat terlihat dari argumentasi selama proses diskusi dan kualitas dalam mengerjakan peran dalam pelaksanaan koordinasi. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui jika setiap pihak memiliki kompetensi yang baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap pegawai mampu untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja sama dalam menciptakan satu tujuan. Kemudian dinilai dari dampak yang diperoleh jika pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya maka pasar ekstrem tidak dapat dikelola dengan baik. Kompetensi pegawai merupakan aspek yang dibutuhkan oleh karena itu setiap pegawai harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Ada tidaknya ketaatan pejabat terhadap kehadiran

Ketaatan para pejabat pengelola pasar ekstrem dapat dilihat dari ketepatan waktu datang sehingga tidak memengaruhi jam mulai pelaksanaan kegiatan, sejauh ini baik dari tim dinas perdagangan maupun tim pengelola lapangan sudah cukup baik dalam ketaatan waktu. Setiap pihak sudah taat dengan aturan yang sudah ditentukan. Setiap pihak dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan pasar ekstrem. Ketaatan yang dimiliki pihak-pihak terkait tujuannya adalah agar visi dan misi yang sudah ditentukan dalam pemebentukan pasar ekstrem dapat tercapai. Berkaitan dengan ketaatan maka diharapkan kedepannya setiap pegawai diwajibkan untuk taat terhadap kebijakan yang sudah ditentukan karena hal ini memberikan dampak pada kegiatan yang dilaksanakan.

4. Kesepakatan dan Komitmen

Ada Tidaknya Agenda Menuju Kesepakatan dan Komitmen

Untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah koordinasi biasanya ada agenda beberapa pejabat untuk berdiskusi, selain itu pemantauan langsung juga dilakukan untuk menilai keputusan akhir dari sebuah kesepakatan atau komitmen. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa rapat koordinasi merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan untuk dapat memantau pengelolaan pasar ekstrem yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Setiap pihak selalu ikut dengan rapat koordinasi apabila instansi diberitahukan jika adanya pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat dinilai merupakan kegiatan yang penting dan berguna untuk melakukan pengukuran serta penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Setiap pihak diharapkan harus ikut dengan adanya rapat koordinasi. Bagi pihak-pihak yang ditunjuk dan memiliki wewenang rapat koordinasi ini harus menjadi sarana dan prasarana dalam membantu peningkatan pengelolaan pasar ekstrem. Oleh karena itu peningkatan intensitas rapat koordinasi harus selalu dikembangkan agar frekuensi jalannya rapat lebih sering dan kontribusi pihak-pihak terkait semakin lebih besar.

Ada Tidaknya Agenda Secara Formal

Agenda formal selalu terlaksana dengan setelah kesepakatan sebagai bentuk pengesahan, seperti gambar di atas bentuk pengesahan terjadi untuk penetapan aturan baru dalam pengelolaan pasar ekstrem di Tomohon. Sesuai dengan hasil wawancara serta observasi maka kegiatan rapat terkait pengelolaan pasar ekstrem sangat dibutuhkan untuk mengelola pasar ekstrem. Pertemuan ini dilaksanakan dengan maksimal mungkin. Setiap pihak diharapkan dapat bekerja sama. Ketika ada rapat koordinasi setiap pihak diharapkan hadir. Dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan berkaitan agenda formal ini dituliskan lewat surat. Diharapkan

kedepannya agar penyampaian informasi agenda formal ini dapat mengalami peningkatan sasaran dan tujuan pihak instansi bisa menggunakan teknologi sebagai sarana yang memberikan kemudahan terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi, melakukan komunikasi, dan menerima informasi

5. Penetapan Kesepakatan Oleh Pihak Yang Berkoordinasi

Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan

Hasil dari kesepakatan yang telah disahkan disimpan dalam bentuk file peraturan resmi untuk menjadi acuan kebijakan baru, seperti pada gambar peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan resmi. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa rapat bentuk kesepakatan adalah hal yang penting untuk dilaksanakan. Bentuk kesepakatan ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena berkaitan dengan keberhasilan pengelolaan pasar ekstrem. Apabila kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan yang dilaksanakan maka pengelolaan pasar ekstrem dapat memperoleh keberhasilan. Setiap pihak diharapkan harus mengikuti seluruh kebijakan yang ditentukan sehingga setiap kebijakan ini mampu menciptakan perubahan ke arah yang jauh lebih baik.

Ada Tidaknya Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari peraturan daerah yang sebelumnya sudah disahkan. Untuk memantau pelaksanaan kegiatan tersebut beberapa pihak terlibat untuk menjaga ketertiban kegiatan. Sesuai dengan hasil wawancara serta observasi maka dapat diketahui jika terdapat pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan. Hal ini dikarenakan setiap pihak mampu nyai wewenang untuk membantu perubahan menjadi lebih baik. Diharapkan setiap pihak mampu membantu keberhasilan pihak yang melaksanakan kegiatan.

6. Insentif Koordinasi

Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kesepakatan

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa tidak ada insentif yang diberikan. Pemberian insentif hanya kepada satpol PP yang membantu petugas perusahaan pasar jika ada hari besar. Hal ini dikarenakan anggaran yang dimiliki tidak cukup jika digunakan untuk pemberian intensif.

Ada Tidaknya Sanksi Bagi Pelanggar Koordinasi

Sanksi yang diberikan karena setiap pihak sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik. Namun, sanksi yang diberikan tetap ada jika ada pihak yang melanggar.

7. Feedback

Ada Tidaknya Umpan Balik Dari Objek dan Subjek Koordinasi

Menilai keberhasilan dari pengelolaan pasar ekstrem kegiatan evaluasi sebagai penyampain feedback baik dari masyarakat maupun pejabat. Gambar di atas merupakan kegiatan evaluasi yang sedang dilakasankan oleh pengelolan pasar untuk mengetahui feedback dari kegiatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwaberbagai perangkat daerah terkait yang ikut berperan aktif dalam mengelola pasar ekstrem mendapatkan tanggapan penilaian yang baik dari masyarakat karena capaian hasil kinerja yang dianggap cukup memuaskan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala namun sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan cukup baik.

Ada Tidaknya Perubahan Terhadap Hasil Kesepakatan

Perubahan dari hasil koordinasi pengelolaan pasar ekstrem meberikan hasil baik, berdasarkan gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan kualita pasar ekstrem di kota tomohon. Berdasarkan data wawancara diatas terdapat perubahan terhadap hasil kesepakatan melalui evaluasi. Evaluasi ini dilakukan terkait pengelolaan pasar ekstrem di Kota Tomohon. Evaluasi diharapkan rutin dilaksanakan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Setiap perangkat daerah dapat memperhatikan kembali SOP dari tiap-tiap pelaksanaan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sama seperti penelitian yang diteliti oleh Octavia, (2020) yang menemukan bahwa SOP yang dilaksanakan susah sesuai ketentuan.

IV. KESIMPULAN

Koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik. Pada segi faktor Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi, Insentif Koordinasi, dan Feedback. Begitu pun dengan faktor pendukung dan faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Pasar Ekstrem di Kota Tomohon serta upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat koordinasi pemerintahan.

Keterbatasan penelitian

Topik penelitian yang luas sehingga membutuhkan informan yang banyak dari berbagai sektor maka dari itu keterbatasan penelitian adalah jumlah informan yang sangat banyak sehingga peneliti perlu memperkecil jangkauan informan

Arahan masa depan

Diharapkan untuk selanjutnya mampu meneliti persepsi masyarakat terhadap koordinasi dalam mengelola pasar ekstrem sehingga mampu mengetahui point of view dari pengguna bukan hanya dari pengelola.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arman. 2019. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Balang-Balang Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Gowa. Diakses 30 November 2023
- Arianty, N. 2013. *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi*
- Azizah, L. N. (2019). ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL. *Jurnal Penelitian Manajemen*, IV(1), 823–831.
- Darmawan, D. (2017). Faktor Komunikasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 8–14.
- Hermanto, F. S. (2017). *Pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang*. Universitas Komputer Indonesia.
- Hasrin, et al. 2022. *Extreme Market in Tomohon City: A Study of The Social Interction*. Proceedings of The 1st International Conference on Management, Education, Social Science, Economics and Technology (ICMEST).
- Ihsan, F. (2018). KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(2), 81–164.
- Irawan, R. 2019. *Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pedagang dalam Pengelolaan Pasar Tertib Ukur (PTU) (Studi pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro)*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023

- Medyawati, Y. W. & Rahayu, M. I. F. 2021. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Kucing dan Anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara)*. Jurnal Hukum Adiguna.
- Mesra, et al. 2022. *Persepsi Masyarakat Minahasa Tentang Pasar “Extreme” Tomohon*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6 (4): 2323-2331
- Mustikasari, Y. (2018). *Pengelolaan Pasar Tradisional (Junjung Buih) di Kecamatan Sintan Kabupaten Sintang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(3), 15–34.
- Octavia, R. W. (2020). *Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangakaln Kuras Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Rahayu, B., Santoso, R. S., & Maesaroh. (2018). *ANALYSIS OF MANAGEMENT STRATEGY OF JOHAR MARKET BY MARKET SERVICE OF SEMARANG*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 2–12.
- Rompas, G. M. H. 2013. *Pasar Tradisional Tomohon (Suatu Kajian Antropologi)*. Jurnal Antropolog
- Tampil, K., Pangkey, M., & Palar, N. (2021). *PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TOWO'E DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN SANGIHE PADA PANDEMI COVID-19*. Jurnal Administrasi Publik, 101(7), 9–17.

